



Peran dan Strategi Pekerja Sosial Masyarakat Wilayah DKI Jakarta dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Muhamad Suharbillah¹, Azzahra Elvina Sari², Syarifah Hudhriah³, Ririn Dwi Prabandari⁴, Khairul Anwar⁵, Wati Nilamsari⁶

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: muhamad.suharbillah22@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan sosial di wilayah perkotaan seperti Jakarta membutuhkan peran aktor lokal yang dapat menjangkau masyarakat, terutama kelompok rentan. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berperan sebagai mitra strategis yang menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan nyata warga. Kegiatan pengabdian Praktikum I bertujuan memperkuat kapasitas PSM melalui praktik lapangan yang melibatkan mahasiswa di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos). Mitra kegiatan adalah PSM di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Metode yang digunakan meliputi pendidikan masyarakat, pelatihan, pendampingan, mediasi, serta observasi pada program Permakanan Lansia (Pokmas) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hasilnya, pemberdayaan yang sistematis meningkatkan kemampuan PSM dalam mengenali kebutuhan warga, menjalankan layanan sosial, serta memperkuat motivasi dan kerja sama. Kegiatan ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan respons cepat terhadap masalah sosial, sehingga memperkuat ketahanan sosial secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pemberdayaan Sosial, Ketahanan Sosial Masyarakat.*

Abstract

Social empowerment in urban areas such as Jakarta requires local actors who can directly reach communities, especially vulnerable groups. Community Social Workers (PSM) act as strategic partners who connect government programs with real community needs. This Practicum 1 community service activity aimed to strengthen the capacity of PSM through field practice involving students at Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, particularly in the Social Empowerment Division (Dayasos). The main partners were PSM located in Central Jakarta and South Jakarta. The methods used included community education, training, mentoring, mediation, and direct observation of two main programs: Elderly Meal Support (Pokmas) and Joint Business Groups (KUBE). The results show that systematic empowerment improves PSM's ability to identify community needs, deliver social services, and strengthen motivation and collaboration. It also increases community participation and faster responses to social issues, helping build sustainable social resilience.

Kata Kunci: *Community Social Workers (PSM), Social Empowerment, Community Social Resilience.*

PENDAHULUAN

Jakarta, sebagai kota metropolitan yang selalu menjadi pusat kegiatan dari Indonesia. Ribuan pendatang datang ke Jakarta setiap tahunnya dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik gemerlapnya lampu-lampu kota dan megahnya gedung-gedung pencakar langit, Jakarta juga menyimpan realitas yang tak kalah mencolok, yaitu masalah kemiskinan, kesenjangan, dan masalah sosial yang kian semakin kompleks.

Pemerintah tentu saja telah membuat berbagai kebijakan dan program untuk menangani masalah ini. Namun kota sebesar Jakarta dengan segala kompleksitasnya tidak bisa hanya diselesaikan oleh kebijakan pemerintah semata. Karena nyatanya, ada banyak celah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang hidup di tengah masyarakat, mengenal warga satu per satu, dan memahami permasalahan yang ada di balik pintu-pintu rumah yang terlihat sepi. Di sinilah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) hadir.

Menjadi PSM merupakan hal yang luar biasa. Mereka bukan orang yang digaji, bukan pula sebagai orang yang diberikan jabatan yang terjamin. Mereka berwujud sebagai tetangga yang peduli. Mereka adalah para Ibu-ibu yang sigap membantu para lansia mengurus Kartu Jakarta Lansia (KJL), para pemuda yang mendampingi anak-anak jalanan untuk kembali bersekolah, atau bapak-bapak yang membantu tetangganya mendapatkan bantuan sosial setelah bencana kebakaran. PSM bekerja dalam senyap, sering kali tanpa pujian dan penghargaan, namun dengan langkah gagahnya memberikan dampak yang luar biasa.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Pemberdayaan Sosial, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan nyata. Pemberdayaan PSM dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan forum komunikasi yang mempertemukan para relawan dari berbagai wilayah. Tujuannya satu, agar mereka tidak merasa sendiri, dan agar mereka mampu menjalankan perannya dengan lebih kuat, terarah, dan efektif.

Pemberdayaan masyarakat menurut Afriansyah et all (2022) merupakan langkah dalam mempersiapkan masyarakat yang beriringan dengan upaya penguatan kelembagaan masyarakat itu sendiri yang menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan. Pemahaman ini memiliki relevansi mengenai peran pekerja sosial masyarakat (PSM) selaku agen yang menyalurkan bantuan, sekaligus menjadi roda penggerak yang menguatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai akar yang memberdayakan. Melalui adanya program kelompok usaha bersama (KUBE), maka aspek kemandirian tercipta melalui nilai ekonomi produktif yang membuka alternatif pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan akan bantuan pemerintah secara berangsur.

Sementara itu, program permakanan lansia yang dibasiskan oleh kelompok masyarakat (pokmas) merealisasikan aspek kesejahteraan dan keadilan sosial dengan memastikan kelompok rentan (lansia tunggal) dapat terpenuhi haknya melalui pendampingan terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kehadiran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menjadi elemen strategis yang menjembatani antara program pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. PSM adalah relawan sosial yang direkrut, dibina, dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos). Mereka berperan sebagai penggerak sosial yang membantu pelaksanaan berbagai program sosial, terutama untuk kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak jalanan, dan keluarga miskin.

METODE

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta, peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menjadi sangat perlu. Sebagai relawan yang memiliki jiwa sosial tinggi dan bersentuhan langsung dengan warga pada tingkat kelurahan, PSM diibaratkan menjadi penggerak terlaksananya berbagai program pemberdayaan yang digagas oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.

Namun, agar intervensi yang dilakukan tidak bersifat top-down dan jangka pendek, dibutuhkan pendekatan yang mampu menggugah kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Dinas Sosial DKI Jakarta dalam pelaksanaan program pemberdayaan PSM mengadopsi pendekatan yang berbasis pada kekuatan dan potensi lokal, salah satunya melalui metode Asset Based Community Development (ABCD).

Asset-Based Community Development (ABCD) memiliki pandangan dasar yang berfokus menganalisis potensi, kekuatan, bakat, dan aset individu serta aset yang berada di dalam suatu masyarakat atau komunitas. Dalam pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) terdapat empat prinsip yang menjadi dasar atau fundamental dalam proses memahami suatu masyarakat atau komunitas. Menurut pemikiran dari Kretzmann And Mcknight, keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aset dan kekuatan. Prinsip ini bertujuan untuk menggali segala potensi dan sumber daya yang dimiliki suatu masyarakat. Dari segala potensi dan sumber daya itulah yang akan dijadikan sebagai aspek untuk menguatkan dan memberdayakan mereka.
2. Identifikasi dan pemetaan. Tahapan ini berfungsi untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki masyarakat dan kemudian akan dimobilisasi. Aset yang diidentifikasi ini berupa kemampuan individu atau komunitas, organisasi atau lembaga yang bekerjasama serta aset fisik berupa; sumber daya alam, perekonomian, nilai kebudayaan dan infrastruktur.

3. *Community driven development* (CDD). Secara bahasa, CCD diartikan sebagai pembangunan berdasarkan komunitas. Dengan demikian prinsip ini berfokus pada aksi yang menempatkan komunitas sebagai tumpuan penggerak dalam upaya pembangunan masyarakat
4. Modal sosial. Prinsip ini menekankan seberapa penting dari modal non material dalam suatu masyarakat yang berupa kapasitas atau kemampuan pada masyarakat itu sendiri.

Pendekatan *Asset Based Community* dalam konteks kerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, khususnya di bawah Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dipandang sangat relevan untuk digunakan sebagai strategi utama dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya. PSM sebagai relawan sosial yang langsung berada di tengah masyarakat, memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengenali berbagai kekuatan dan sumber daya yang ada di lingkungannya. Mereka tidak hanya hadir sebagai pendamping, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial. Selain itu, *Asset-Based Community Development* (ABCD) merupakan metode pemberdayaan berkelanjutan yang dilandaskan pada aset, kekuatan, dan potensi yang ada pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dikembangkan dalam hal kapasitas, basis asosiasi, dan kelembagaan sosial, dan tidak didasarkan pada aset yang tidak dimulai dari masalah atau kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dalam hal ini masyarakatlah yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut (Setyawan et al, 2022).

Dalam pendekatan ABCD, PSM diarahkan untuk menggali potensi masyarakat secara menyeluruh, baik dari individu, kelompok, lembaga lokal, hingga sumber daya alam yang tersedia. Hal ini menjadi langkah awal (tahap identifikasi masalah) dalam proses pemberdayaan, di mana PSM membantu masyarakat untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk berubah. Selanjutnya, PSM memfasilitasi masyarakat untuk menentukan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Di tahap ini, masyarakat mulai membangun kesadaran kolektif bahwa perubahan sosial bisa dimulai dari harapan bersama yang lahir dari kekuatan internal mereka sendiri. Setelah itu, pada tahap perencanaan, PSM mendorong masyarakat untuk menyusun rencana kerja yang konkret dan realistis berdasarkan aset yang telah dikenali. Ini menjadi momen penting dalam membentuk kepemimpinan lokal dan membagi peran antarwarga. Terakhir, di tahap pelaksanaan, masyarakat mulai menjalankan rencana yang telah disusun dan mengimplementasikan kegiatan yang telah disepakati. PSM tetap hadir sebagai pendamping yang memberi motivasi dan membantu evaluasi berkala.

Pendekatan ABCD ini memiliki nilai lebih dibanding pendekatan konvensional yang berfokus pada kekurangan atau masalah masyarakat. Dengan ABCD, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai pelaku utama perubahan. Bagi PSM, pendekatan ini sangat membantu dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah,

sekaligus membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab warga dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Dalam praktiknya, PSM di DKI Jakarta dapat menggunakan ABCD untuk berbagai kegiatan, seperti pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, pembinaan kelompok rentan, atau pengembangan kampung sosial. Misalnya, jika di suatu RW terdapat ibu-ibu yang memiliki keterampilan memasak, PSM dapat mendorong pembentukan usaha catering rumahan dengan melibatkan warga sekitar. Ini adalah contoh konkret dari pemanfaatan aset individu dan sosial untuk kepentingan bersama. Namun, dalam upaya untuk optimalisasi penerapan pendekatan ini, masih dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan kepada para PSM agar mereka benar-benar memahami metode ABCD secara utuh. Selain itu, perlu ada dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas, serta akses terhadap jaringan dan pasar.

Secara keseluruhan, pendekatan ABCD sangat tepat diterapkan oleh PSM di bawah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta karena selaras dengan prinsip pemberdayaan sosial yang berbasis pada potensi lokal, partisipasi aktif, dan kemandirian. Jika diterapkan secara konsisten dan sistematis, pendekatan ini akan mampu menciptakan masyarakat yang tangguh, produktif, dan memiliki daya saing, tanpa harus selalu bergantung pada bantuan dari luar.

Mengenai pola kerja dari pekerja sosial masyarakat (PSM) dapat dicocokkan dengan sebuah teori sosiologi yang dikemukakan oleh Maximilian Weber, yakni teori aksi atau teori tindakan. Teori aksi ini menjelaskan bahwa manusia merupakan seorang individu yang memiliki dua arah dalam menentukan sebuah tindakan. Tindakan tersebut dapat berasal dari inisiatif atau kesadaran diri sendiri dan juga dapat terpicu oleh situasi yang berasal dari luar diri sendiri. Pernyataan dari teori ini relevan dengan bagaimana sistem dari pekerja sosial masyarakat (PSM) dilaksanakan. Kembali kepada dasar dari PSM yang berupa sekumpulan individu yang mendedikasikan dirinya untuk menolong masyarakat tanpa imbalan. Melalui adanya orang lain yang mengalami permasalahan di lingkungan sekitar, hal tersebut menjadi faktor luar yang memicu aksi seorang individu untuk bertindak. Kemudian rangsangan eksternal tersebut menumbuhkan upaya untuk membangkitkan kesadaran individu yang merasa prihatin terhadap orang tersebut, sehingga memunculkan inisiatif dengan kesadaran penuh untuk memberi pertolongan.

Peran dan partisipasi pekerja sosial masyarakat (PSM) ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanjani et al (2023) menunjukkan bahwa PSM merupakan tonggak yang mewadahi kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu dan menolong masyarakat. PSM sekiranya hadir sebagai komunitas yang mengemban empat peranan penting dalam lingkungan sosial, diantaranya ialah sebagai inisiator, motivator, dinamisator, dan administrator. Dalam perannya sebagai inisiator, PSM bergerak untuk menginisiasikan langkah penyelesaian masalah

sosial yang dimulai dari identifikasi, perancangan, hingga pelaksanaan. Pemberian motivasi pun juga dilakukan oleh PSM sebagai motivator kepada para pihak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang merasa diasingkan oleh lingkungan sosialnya. Melalui pendekatan dan komunikasi yang intensif, PSM secara perlahan membangun kembali kepercayaan diri para PPKS agar mereka dapat kembali menepatkan rasa optimisme untuk melangkah. Apabila dilihat dari pelaksanaannya di lapangan, PSM tidaklah bekerja sendiri. Melalui perannya sebagai dinamisator, PSM bergerak untuk membangkitkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal penanganan masalah kesejahteraan sosial. Semua langkah yang telah dilaksanakan kemudian akan dicatat dan dilaporkan ke berbagai pihak yang terlibat. Hal ini merupakan peranan PSM sebagai administrator yang memantau langsung segala dinamika kondisi lingkungan masyarakat yang berguna untuk evaluasi ataupun perencanaan penanganan selanjutnya.

PSM turut meletakkan perhatiannya pada kasus penanganan anak jalanan. Mintanawati (2019) menuliskan bahwa ikatan pekerja sosial masyarakat (IPSM) berpartisipasi dalam menyejahterakan nasib anak-anak jalanan yang kian terlantar. Penanganan ini dimulai dari tahap penjangkauan yang mempertemukan PSM dengan anak-anak jalanan untuk berkomunikasi secara terbuka agar dapat diketahui latar belakang permasalahan yang ada secara menyeluruh. Kemudian anak-anak jalanan tersebut akan dibina dan didampingi selama proses pemenuhan hak hidupnya. Dimulai dari pemenuhan hak pendidikan, hak kesehatan, hak tempat tinggal, dan hak untuk mendapat fasilitas pengembangan minat dan bakat.

Muktiwibowo dan Prayogi (2022) menerangkan jika PSM di Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung telah merealisasikan program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) sejak tahun 2008. Program ini melibatkan PSM dalam kegiatan rehabilitasi masyarakat. Program ini telah difasilitasi dan didukung infrastrukturnya oleh desa berupa satu unit bangunan yang menjadi tempat penyelenggaraan program. Pada pelaksanaannya, PSM bertugas dalam menjalani kegiatan rutin program berupa terapi, pertemuan rutin antara pelaksana RBM dengan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta perawatan seluruh fasilitas gedung RBM. Semua kegiatan tadi merupakan realisasi dan partisipasi nyata dari PSM dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat melalui adanya lembaga rehabilitasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kehadiran golongan wanita yang rentan pun tak luput dari kiprah para pekerja sosial masyarakat (PSM). Apriliandra et al (2022) menyatakan bahwa komunitas PSM bergerak dalam membentuk sebuah lembaga yang bernama Panti Sosial Karya Wanita (PSKW). Lembaga ini mengorganisir kalangan wanita atau perempuan yang mengalami permasalahan berupa status rawan dalam hal sosial dan ekonomi dengan memberikan pelatihan kerja ataupun keterampilan wirausaha. PSM menjalankan fungsinya sebagai kelembagaan yang melindungi hak para perempuan di PSKW berdasarkan teori pekerja sosial yang dikemukakan

oleh Parsons. Diantara fungsi kelembagaan tersebut ialah sebagai fasilitator, penghubung klien terhadap sumber daya untuk penyelesaian masalah, mediator, pembela kepentingan dan tujuan komunitas, pelindung hak para klien, serta pendidik yang berkontribusi dalam peningkatan kapasitas masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai peranan pekerja sosial masyarakat (PSM) yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan menjadi satu sudut pandang yakni PSM sebagai pendamping sosial. Andari (2020) dalam penelitiannya menuliskan bahwa PSM mengemban status pendamping sosial sebagai bentuk tuntunan profesionalitas seorang pekerja sosial itu sendiri. Bidang yang diajajaki oleh PSM pun mencakup berbagai hal yang berputar di sekitar lingkungan masyarakat. Pemberdayaan dan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan program terdepan PSM karena kedua hal itulah yang bersentuhan langsung dengan upaya menyoong masyarakat yang rentan dan membutuhkan. Tetapi masih terdapat hal yang cukup disayangkan sepanjang kiprah pekerja sosial masyarakat (PSM), yakni minimnya perhatian para penyelenggara pemerintahan dalam menguatkan kontribusi PSM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) pun turut berkontribusi dalam pembangunan Masyarakat. Dinyatakan dalam penelitian Suryanti et al (2023) mengenai Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) yang berperan sebagai wadah koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman, serta pengembangan keterampilan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial, yang salah satunya adalah kewirausahaan. Berbagai jenis kegiatan kewirausahaan dilaksanakan oleh IPSM sebagai upaya pembiasaan pekerja, monitoring, hingga sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Secara substansial penggelaran kegiatan kewirausahaan ini merupakan langkah membangun masyarakat yang berkapasitas untuk menghasilkan pemasukan tambahan, memahami manajemen risiko, komitmen karir wirausaha dalam penyediaan nilai bagi barang dan jasa, hingga pengaplikasian keterampilan ilmu wirausaha dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktikum I di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos), memberikan pengalaman observasi dan keterlibatan langsung mahasiswa dalam proses pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum berlangsung selama tiga bulan dan mencakup empat tahapan utama: pra-praktikum, pengenalan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Pada tahap pra-praktikum, Tahap pra-praktikum merupakan fondasi penting bagi keberhasilan Praktikum I karena pada fase ini seluruh persiapan konseptual, administratif, dan teknis dilakukan secara matang. Kegiatan dimulai dengan diskusi internal kelompok untuk menyatukan persepsi, membagi peran, dan menentukan lembaga mitra yang sesuai melalui riset awal, telaah laporan praktikum sebelumnya, serta konsultasi dengan dosen pembimbing. Setelah mempertimbangkan lembaga-lembaga yang berfokus pada pemberdayaan,

Dayasos Dinas Sosial DKI Jakarta akhirnya dipilih karena memiliki program yang paling relevan dan terstruktur. Kelompok kemudian menyusun proposal lengkap, mengajukan permohonan resmi, dan menjalin komunikasi awal dengan pihak lembaga hingga dilakukan diskusi langsung melalui *Google Meet* untuk membahas teknis kegiatan, pembagian tugas, dan fokus program praktikum.



Gambar 1. Seminar Proposal Praktikum

Selanjutnya, proposal yang telah disahkan dipresentasikan dalam Seminar Proposal Praktikum I pada tanggal 21 Februari 2025 sebagai bentuk validasi kesiapan mahasiswa sebelum turun ke lapangan. Kemudian, mahasiswa mengikuti orientasi dari pihak Dinas Sosial untuk memahami struktur organisasi, tugas masing-masing seksi, dan etika kerja. Tahap ini ditutup dengan pembagian peran internal kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Melalui rangkaian pra-praktikum yang sistematis ini, mahasiswa memperoleh pemahaman awal mengenai komunikasi kelembagaan, pentingnya kerja terstruktur, serta kesiapan mental dan profesional untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Memasuki tahap pengenalan, merupakan langkah penting sebelum memasuki hari pertama Praktikum I karena memberikan pemahaman awal mengenai lingkungan kerja di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos). Pada tahap ini, mahasiswa mendapat orientasi langsung dari Kepala Bidang Dayasos mengenai fungsi, program, serta peran strategis unit-unit seperti PSM, Karang Taruna, TSKK, dan LKS dalam menjalankan pemberdayaan sosial. Selanjutnya, dilakukan perkenalan dengan seluruh staf di tiap subkelompok untuk membangun relasi, memahami alur komunikasi, dan mengetahui pembimbing lapangan yang akan memberikan arahan teknis. Mahasiswa juga menerima penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan, baik terkait kegiatan administratif maupun kegiatan lapangan bersama mitra eksternal seperti dunia usaha, organisasi sosial, relawan, serta aparat wilayah. Selain itu, orientasi teknis mengenai SOP, sistem pelaporan, dan pembagian tugas diberikan untuk memastikan mahasiswa dapat bekerja secara efektif dan sesuai aturan. Tahapan pengenalan yang berlangsung dari 3 Maret hingga 28 Mei 2025 ini menjadi bekal penting agar mahasiswa mampu beradaptasi, memahami sistem kerja, serta siap berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat selama praktikum berlangsung.

Pada tahap perencanaan, kami memahami bahwa pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, khususnya Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos), merupakan proses sistematis dan berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya berupa pelatihan satu arah, tetapi mencakup identifikasi calon relawan, pelaksanaan pelatihan, pembinaan rutin, hingga evaluasi. Proses dimulai dengan seleksi calon PSM dari masyarakat yang memiliki kepedulian sosial tinggi dan bersedia terlibat secara sukarela, kemudian didaftarkan secara resmi sebagai bagian dari jaringan PSM di wilayah DKI Jakarta. Setelah itu, mereka mengikuti berbagai pelatihan mulai dari tugas dan fungsi PSM, pemetaan sosial, komunikasi, hingga teknik penanganan kasus. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan periodik, baik luring maupun daring.

Selain pelatihan, pembinaan rutin melalui pertemuan dan forum komunikasi memberikan ruang bagi PSM untuk berbagi pengalaman, menyampaikan hambatan, serta mendapatkan arahan teknis dari pembina. Dukungan pemerintah daerah juga terlihat melalui pemberian fasilitas, termasuk seragam bagi ketua PSM di setiap kelurahan. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa pemberdayaan PSM dirancang untuk memperkuat kapasitas, motivasi, dan profesionalitas relawan sosial agar mampu menjalankan perannya secara optimal di masyarakat.



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Ketua PSM Jakarta Pusat

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan Selama Praktikum I di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, kami terlibat langsung dalam dua program pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yaitu Pokmas Permakanan Lansia di Jakarta Pusat dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan. Pada program permakanan lansia, kami mengamati proses kerja Pokmas dalam menyiapkan, mengolah, mengemas, dan mendistribusikan makanan kepada para lansia tunggal di empat kelurahan Kecamatan Johar Baru, mulai dari sosialisasi program, pembinaan teknis, hingga pelaporan distribusi.



Gambar 3. Pokmas Permakanan Lanjut Usia Johar Baru

KUBE Alkesa Lestari di Cipedak, kami melihat bagaimana PSM mendampingi masyarakat dalam membangun usaha rumahan melalui pelatihan produksi, manajemen usaha, inovasi produk, dan penguatan motivasi anggota. Dalam kegiatan KUBE, kami turut berperan sebagai fasilitator, memberikan ide kreatif, membantu pemetaan masalah dan potensi, serta melakukan dokumentasi kegiatan untuk evaluasi dan pengembangan program. Melalui keterlibatan ini, kami memahami bahwa PSM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, sementara keikutsertaan mahasiswa memberikan kontribusi nyata melalui pendampingan, inovasi, dan penerapan ilmu di lapangan.



Gambar 4. Dokumentasi bersama PSM Jakarta Selatan



Gambar 5. Proses Pengolahan singkong KUBE ALkesa

Berdasarkan rangkaian kegiatan yang dilakukan selama Praktikum I, terlihat bahwa proses pemberdayaan sosial di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki pola kerja yang sistematis dan kolaboratif. Tahap pra-praktikum menjadi fondasi penting karena menuntut kesiapan mahasiswa dalam memahami konteks lembaga dan menyiapkan perangkat administratif yang dibutuhkan. Kesiapan ini terbukti memudahkan mahasiswa saat memasuki tahapan berikutnya.

Pada tahap pengenalan, pemahaman tentang struktur organisasi Dayasos dan unit-unit sosial terkait memperlihatkan bahwa pemberdayaan sosial tidak hanya dijalankan oleh aparatur pemerintah, tetapi juga melibatkan relawan seperti PSM, LKS, Karang Taruna, hingga mitra eksternal. Pengetahuan ini memperluas perspektif mahasiswa bahwa pemberdayaan merupakan kerja kolektif yang melibatkan berbagai elemen sosial.

Tahap perencanaan menunjukkan bahwa setiap program sosial memerlukan pemetaan kebutuhan, penyusunan strategi, serta koordinasi lintas pihak sebelum bisa dijalankan. Dayasos tampak menempatkan penguatan kapasitas PSM sebagai prioritas strategis karena PSM adalah ujung tombak

pelayanan sosial di tingkat akar rumput. Penguatan melalui pelatihan, pembinaan rutin, dan forum komunikasi terbukti meningkatkan kemampuan PSM dalam menangani isu sosial secara mandiri.

Dalam tahap pelaksanaan, mahasiswa menemukan bahwa praktik lapangan sangat dinamis. Kegiatan pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan intervensi langsung, tetapi juga administrasi, komunikasi lintas sektor, dan pendampingan kasus. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pokmas permakanan, interaksi dengan pendamping PKH, serta kunjungan ke LKS memperlihatkan variasi masalah sosial yang ditangani oleh PSM dan pemerintah daerah. Hal ini memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas pelayanan sosial di wilayah perkotaan.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa penguatan peran PSM merupakan elemen kunci dalam strategi pemberdayaan di DKI Jakarta. PSM memiliki kedekatan langsung dengan warga, sehingga mampu melakukan identifikasi kebutuhan sosial secara cepat dan efektif. Melalui sinergi antara PSM, lembaga formal, dan masyarakat, proses pemberdayaan menjadi lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan. Praktikum ini menjadi pengalaman penting bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana teori pemberdayaan diterapkan dalam konteks nyata serta bagaimana tantangan sosial ditangani melalui kolaborasi yang terstruktur.

SIMPULAN

Pelaksanaan Praktikum I di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos), memberikan pemahaman yang mendalam kepada kami mengenai bagaimana proses pemberdayaan sosial dilaksanakan secara nyata dalam konteks kelembagaan dan komunitas. Selama kegiatan berlangsung, kami menyaksikan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan warga, sekaligus sebagai penggerak sosial yang bekerja dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kemanusiaan. Melalui program-program pemberdayaan yang disusun oleh Bidang Dayasos, kami melihat adanya capaian output yang terstruktur. Output tersebut meliputi peningkatan kapasitas PSM, tersedianya pedoman kerja, serta terbentuknya jaringan komunikasi antarwilayah yang berperan penting dalam memperkuat solidaritas dan efisiensi kerja sosial di tingkat lokal. Selain output yang bersifat teknis, kami juga mencermati sejumlah outcome yang berdampak secara sosial. PSM kini tampil lebih aktif dalam mendampingi warga, mengidentifikasi permasalahan, dan memfasilitasi solusi bersama. Partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial mengalami peningkatan, dan beberapa wilayah menunjukkan penurunan kasus sosial karena adanya respons cepat berbasis komunitas. Terbangunnya kerja kolaboratif antara masyarakat dan lembaga juga menjadi indikator penting dari keberhasilan program ini. Melalui Praktikum I ini, kami tidak hanya memperoleh pembelajaran konseptual mengenai peran kelembagaan dalam pembangunan sosial, tetapi juga mendapatkan pengalaman reflektif tentang nilai-nilai sosial yang hidup dalam

masyarakat. Keterlibatan PSM yang bekerja secara sukarela, penuh kepedulian, dan dekat dengan warga menjadi bukti bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesediaan manusia untuk hadir bagi sesamanya. Inilah esensi dari kerja sosial yang kami pahami selama proses praktikum I berlangsung, kerja yang tumbuh dari empati, kebersamaan, dan komitmen terhadap perubahan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurohim. (2023). Pemberdayaan Masyarakat. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial (The Role Of Social Workers In Social Assistance). *Angewandte Chemie International*, 6(1), 5-24.
- Apriliandra, S., Suwandi, A. A., & Darwis, R. S. (2022). Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Komunitas Perempuan Rawan Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.37538>
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2023). Profil Bidang Pemberdayaan Sosial: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesejahteraan sosial. Dinsos DKI.
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2023). Profil Dinas Sosial DKI Jakarta. <https://dinsos.jakarta.go.id>
- Hanjani, A. A., Aritonang, A. N., & Mildawati, M. (2023). Peran Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*
- Mintanawati, N. (2018). Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Anak Jalanan. *WELFARE Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(2).
- Muktiwibowo, A., & Prayogi, A. (2022). Peran pekerja sosial masyarakat dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak penyandang disabilitas berbasis masyarakat. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 21(1), 39-54. <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.533>
- Setyawan, W. H., Mansur, Rahayu, B., Maryam, S., Aslichah, Khoiruddin, Muafiqie, H., Marendah, E., Ratnaningtyas, Nurhidayah, R., & Efendi, M. Y. (2022). *Asset Based Community Development (ABCD)* (W. H. Setyawan (ed.)). PT Gaptek Media Pustaka.
- Suryanti, H., Dewi, D. H., & Wijaksono, G. P. (2023). Pelatihan Kewirausahaan Pengurus Organisasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) DKI Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum (Dimas-Undar)*, 0085, 12. https://www.researchgate.net/publication/386159331_Pelatihan_Kewirausahaan_Pengurus_Organisasi_Ikatan_Pekerja_Sosial_Masyarakat_IPSM_DKI_Jakarta#fullTextFileContent